

RENJA 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU



**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, dimana kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Tahunan Badan Pendapatan Daerah dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah dimana dalam RENJA–SKPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam melaksanakan RENJA–SKPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tergambarkan rencana kerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam tahun 2025, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



JOSMAN, S.IP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.19720610 200604 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	9
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Penelaahan Usulan & Program	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3 Program dan Kegiatan	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 20237) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bapenda merupakan produk perencanaan Pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas/badan dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Uluagar memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi, dan kebutuhan dinas yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Mahakam Ulu sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang telah diprioritaskan. Selain itu, Renja juga bermanfaat sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2025 dan menjadi alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulusecara terukur.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, memberikan focus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas kegiatan dan menyalurkan aspirasi bidang dan bagian dalam pererencanaan SKPD dalam rangka ikut memajukan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu. Serta menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja secara terukur.

Menyadari pentingnya Renja sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka diharapkan semua pemangku kepentingan yang terlibat baik pimpinan, staf, maupun mitra kerja secara bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa, dan bagaimana rencana kerja tersebut diterjemahkan dari kebijakan umum daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2023

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renja, Kebijakan dan menguraikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 didasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 telah melaksanakan 3 (Tiga) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja..Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Anggaran Sebesar Rp. 8.198.603.745,-

Proporsi Realisasi Anggaran Sebesar 85,69%

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Anggaran Sebesar Rp 152.636.000,-

Proporsi Realisasi Anggaran Sebesar 94,30 %

3. Program pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan Anggaran Sebesar Rp 3.530.020.250,-

Proporsi Realisasi Anggaran Sebesar 94,33%

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Bapenda Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja CPD	3 Dokumen		Rp 82.878.000,00	Rp 81.593.440,00	98,45	Rp 263.456.700	Rp 30.718.000		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen administrasi pembauran gaji dan tunjangan ASN	84 Dokumen		Rp 3.904.399.095,00	Rp 3.056.667.905,00	78,29	Rp 4.096.368.502	Rp 3.460.206.381		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen		Rp 222.120.000,00	Rp 170.970.000,00	76,97	Rp 204.860.000	Rp 196.480.000		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan realisasi penerimaan dan sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	57 Dokumen		Rp 176.845.000,00	Rp 176.261.199,00	99,57	Rp 208.196.200	Rp 68.148.800		
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah monitoring	48 Jenis Komponen		Rp 5.122.800,00	Rp 2.570.000,00	50,17	Rp 35.436.100	Rp 124.204.000		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Peralatan	30 Jenis Peralatan		Rp 81.000.000,00	Rp 81.000.000,00	100,00		Rp 7.102.000		
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Meja dan Kursi Rapel dan Meja dan Kursi Temu yang disediakan	48 Kali		Rp 476.414.850,00	Rp 475.370.000,00	99,78	Rp 453.164.600	Rp 12.989.000		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48 Barang Cetakan dan 300 kali Penggandaan		Rp 31.844.000,00	Rp 31.772.000,00	99,77	Rp 25.751.000	Rp 25.263.000		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke daerah dan dalam daerah yang diikuti	60 Kali		Rp 675.925.000,00	Rp 668.755.764,00	98,94	Rp 404.413.000	Rp 121.112.450		

5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Triwulan		Rp	27,000,000.00	Rp	27,000,000.00	100.00	Rp	31,490,000	Rp	13,500,000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemberian dan pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali		Rp	30,975,000.00	Rp	14,000,000.00	45.20	Rp	24,990,500	Rp	5,400,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah dokumen administrasi Pemerintahan hak tenaga non PNS	72 Dokumen		Rp	75,020,000.00	Rp	75,000,000.00					
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Rp	2,193,800,000.00	Rp	2,000,438,450.00	91.19	Rp	2,131,979,200	Rp	427,840,000
5.02.01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggara pemeliharaan kendaraan dinas dan jumlah surat kendaraan yang di perbaharu pemeliharannya	24 Triwulan		Rp	153,720,000.00	Rp	130,324,000.00	84.78	Rp	57,886,000	Rp	84,425,000
5.02.01.2.09.01	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor yang diadakan	24 Kegiatan		Rp	61,540,000.00	Rp	33,380,000.00	54.24	Rp	199,840,000	Rp	107,153,000
5.02.01.2.09.11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
5.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi Baga Hasil Pajak dengan Pemerintah Pusat yang dilakukan/sesuai	40 Kegiatan		Rp	152,636,000.00	Rp	143,932,308.00	94.30	Rp	446,198,000	Rp	265,585,312
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan												
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Koordinasi dengan OPD terkait	12 Kali		Rp	163,096,000.00	Rp	110,582,660.00	67.80	Rp	58,627,400	Rp	188,380,460
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Cakupan Pelaporan Pajak Daerah secara In Depth di Kecamatan	21 Laporan		Rp	186,564,000.00	Rp	178,464,167.00	95.68	Rp	388,808,000	Rp	81,911,200
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	20 kali		Rp	101,528,250.00	Rp	58,610,000.00	57.73	Rp	150,810,700	Rp	587,959,550
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelitbuzi Daerah	2500 WP		Rp	284,279,000.00	Rp	272,992,091.00	96.03	Rp	340,037,900	Rp	223,052,400
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Tersedia Data Potensi Wajib Pajak	4510 WP		Rp	305,823,000.00	Rp	298,126,350.00	97.48	Rp	398,816,000	Rp	562,472,300
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NOP PBB dan BPHTB yang telah dinilai	61600 NOP		Rp	1,689,026,000.00	Rp	1,669,974,848.00	98.87	Rp	1,276,994,900	Rp	305,065,000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Kelengkapan Wajib Pajak yang diterbitkan	14,700 SKP		Rp	314,079,000.00	Rp	302,489,324.00	96.31	Rp	372,719,900	Rp	471,267,450
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	170 Kegiatan		Rp	267,212,000.00	Rp	241,450,445.00	84.07	Rp	356,335,100	Rp	147,927,000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak Terverifikasi	80%		Rp	55,053,000.00	Rp	54,773,000.00	99.69	Rp	298,470,000	Rp	62,957,000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Piutang Pajak (SKP) yang tertagih	815 SKP		Rp	143,360,000.00	Rp	142,234,400.00	99.21	Rp	472,477,400	Rp	522,531,950

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Mahakam Ulu

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 47 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu . Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pajak Daerah , retribusi dan Pendapatan lain-lain , dan Perimbangan , Perencanaan , Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Pajak Daerah;
- c. Perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Retribusi dan Pendapatan lain- lain;
- d. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang dana perimbangan;
- e. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengembangan pendapatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Penetapan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan yang meliputi Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan Pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2025.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Presentase Target Penerimaan Pajak Yang Terealisasi		100%	100%	100%	100%	86,47%	94,33%	100%	100%	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mahakam Ulu terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah. Kondisi pendapatan daerah sangat menentukan berbagai kemungkinan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut, sehingga permasalahan yang timbul perlu diambil langkah-langkah yang nyata dalam -meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai sektor penerimaan yang potensial namun belum optimal diupayakan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut Bapenda berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, upaya tersebut yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

Untuk perencanaan kinerja khusus pada urusan pemerintahan yaitu Aspek Daya Saing Daerah, Kualitas Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

merupakan acuan Badan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah berdasarkan target dan realisasi yang akan dicapai. Kegiatan ini dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu secara berkesinambungan.

1.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Untuk Tahun 2025 Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya yang terkait Penerimaan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu :

- a. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dan penempatan pegawai masih belum optimal;
- b. Terbatasnya infrastruktur Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga sulitnya akses antar daerah dalam wilayah tersebut;
- c. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Tunggakan pajak masih besar, yang disebabkan oleh pelimpahan tunggakan dari Kabupaten Kutai Barat;
- e. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari *stakeholder*;
- f. Terjadinya pengenaan pajak dari Kabupaten Kutai Barat dan pajak Kabupaten Mahakam Ulu terhadap objek pajak yang sama;
- g. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah masih belum tergali dan dikembangkan;
- h. Fungsi pengawasan dari tahun ke tahun belum berjalan dengan maksimal, salah satunya adalah kurangnya tenaga terlatih dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan penyeteroran pajak;
- i. Adanya keterlambatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan atas usahanya;
- j. Terlalu kuatnya intervensi hak budget DPRD;
- k. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang menunjang kegiatan Bapenda;
- l. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, mendaftarkan, dan merubah data PBB;
- m. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; serta
- n. Terbatasnya kapasitas SDM dalam hal jumlah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi yang disyaratkan.

1.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2025 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu BADAN PENDAPATAN DAERAH											
Rancangan awal SKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN					KEUANGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (DPT)		Rp 263.456.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPT		Rp 263.456.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen administrasi pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 4,096,348,502	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen administrasi pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 4,096,348,502	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp 204,840,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp 204,840,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan realisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah dan lain - lain PAD yang sah		Rp 208.196.200	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan realisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah dan lain - lain PAD yang sah		Rp 208.196.200	

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Bagi Hasil Pajak dengan Pemerintah Pusat yang diikuti/dilaksanakan		Rp	446,198,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Bagi Hasil Pajak dengan Pemerintah Pusat yang diikuti/dilaksanakan	Rp	446,198,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Koordinasi dengan OPD teknis		Rp	58,627,400	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Koordinasi dengan OPD teknis	Rp	58,627,400
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Pelaporan Pajak Daerah secara In Depth di Kecamatan		Rp	388,808,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Pelaporan Pajak Daerah secara In Depth di Kecamatan	Rp	388,808,000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah		Rp	150,810,700	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	Rp	150,810,700
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah		
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Tersedia Data Potensi Wajib Pajak		Rp	340,037,900	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Tersedia Data Potensi Wajib Pajak	Rp	340,037,900
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBDP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NOP PBB dan BPHTB yang telah dinilai				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBDP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NOP PBB dan BPHTB yang telah dinilai	Rp	1,276,994,900
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Kelengkapan Wajib Pajak yang diterbitkan		Rp	372,719,900	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Kelengkapan Wajib Pajak yang diterbitkan	Rp	372,719,900
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp	358,335,100
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak terverifikasi		Rp	298,470,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak terverifikasi	Rp	298,470,000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Piutang Pajak (SKP) yang tertagih		Rp	472,497,400	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Piutang Pajak (SKP) yang tertagih	Rp	472,497,400

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025, dimana terdapat 3 Program dan 7 Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan paguindikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up*

dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30 % dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk

membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periodeterbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.

Tujuan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b. Mewujudkan pembangunan yang direncanakan melalui pencapaian penerimaan secara

maksimal; dan

- c. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan.

Sasaran dan indikator sasaran yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukansesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

- a. Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang berorientasi Kepada Penerimaan Daerah;
- b. Tercapainya Peningkatan Kualitas Pembiayaan Pembangunan;
- c. Tercapainya peningkatan kinerja aparat dalam rangka meningkatkan penerimaan; dan
- d. Tercapainya Peningkatan Informasi dan Komunikasi dalam Penerimaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja yang yang disusun dan direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah untuk merealisasikan misi yang telah disepakati guna dilaksanakan sebaik mungkin. Adapun Program dan Kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33.									
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025									
Kabupaten Mahakam Ulu									
BADAN PENDAPATAN DAERAH									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEUANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik		100%	15,742,241,369			100%	15,742,241,369
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 dokumen	600,000,000			6 dokumen	600,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	250,000,000			1 dokumen	250,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		3 dokumen	350,000,000			3 dokumen	350,000,000

		Realisasi Kinerja SKPD							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tercapainya Administrasi Keuangan perangkat daerah		100%	6,204,422,549			100%	6,204,422,549
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18 orang	5,249,822,549			18 orang	5,249,822,549
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	264,600,000			12 Dokumen	264,600,000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		100%	345,000,000			100%	345,000,000
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		8 Laporan	175,000,000			8 Laporan	175,000,000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		4 dokumen	170,000,000			4 dokumen	170,000,000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase tercapainya Administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 unit, 80 paket ,4 dokumen, 14 Orang	1,048,451,820			1 unit, 80 paket ,4 dokumen, 14 Orang	1,048,451,820
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit	126,438,000			1 Unit	126,438,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		80 Paket	81,540,500			80 Paket	81,540,500
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 dokumen	145,000,000			4 dokumen	145,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		14 Orang	695,473,320			14 Orang	695,473,320
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah		23 Paket , 15 Laporan	2,833,501,000			23 Paket , 15 Laporan	2,833,501,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	108,501,000			4 Paket	108,501,000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	850,000,000			10 Paket	850,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	750,000,000			2 Paket	750,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	600,000,000			3 Paket	600,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	200,000,000			4 paket	200,000,000
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	325,000,000			15 Laporan	325,000,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	80,000,000			1 Dokumen	80,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah		22 Unit	420,000,000			22 Unit	420,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	100,000,000			2 unit	100,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang		10 Unit	120,000,000			10 Unit	120,000,000

		Disediakan							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	200,000,000			10 Unit	200,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		8 Laporan, 55 Orang	4,375,866,000			8 Laporan, 55 Orang	4,375,866,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	58,200,000			4 Laporan	58,200,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	198,200,000			4 Laporan	198,200,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	50,000,000			-	50,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		55 orang	4,069,466,000			55 orang	4,069,466,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah		29 Unt	260,000,000			29 Unt	260,000,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25 unit	160,000,000			25 unit	160,000,000
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		4 Unit	100,000,000			4 Unit	100,000,000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan							
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi Bagi Hasil Pajak dengan Pemerintah Pusat yang diikuti/dilaksanakan		9 dokumen	300,000,000			9 dokumen	300,000,000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		9 dokumen	300,000,000			9 dokumen	300,000,000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				4,382,769,500				4,382,769,500
		Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi		100.0 %				100.0 %	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase sub kegiatan yang dilaksanakan/ diikuti							
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		3 dokumen	300,000,000			3 dokumen	300,000,000

	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		6 dokumen	388,808,000			6 dokumen	388,808,000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		2 Laporan	209,906,000			2 Laporan	209,906,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Unit	200,000,000			1 Unit	200,000,000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		5 Laporan	300,000,000			5 Laporan	300,000,000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		5 Laporan	265,000,000			5 Laporan	265,000,000
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		1010 NOP	750,000,900			1010 NOP	750,000,900
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		150 Dokumen	250,000,000			150 Dokumen	250,000,000

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		11 Layanan	200,000,000			11 Layanan	200,000,000
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		25 Dokumen	298,470,000			25 Dokumen	298,470,000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		125 Dokumen	352,875,800			125 Dokumen	352,875,800
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		10 dokumen	252,988,000			10 dokumen	252,988,000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		5 dokumen	188,000,000			5 dokumen	188,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4 Laporan	251,720,800			4 Laporan	251,720,800
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Laporan	175,000,000			1 Laporan	175,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH

REKAP RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH					
KAB.MAHAKAM ULU TA 2025					
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Daerah Penanggungjawab"	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output) Lokasi				"Unit Kerja Perangkat at
		2025			
		target	Rp		
(4)	(5)	(15)	(16)	(21)	(22)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	15,559,352,369	BAPENDA	Kabupat en Mahaka m Ulu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	600,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	250,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	350,000,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tercapainya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	5,514,422,549		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	5,249,822,549		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				

Pelaksanaan Tugas ASN"	12 Dokumen	264,600,000			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100%	427,111,000		
Pengolahan Data Retribusi Daerah	"Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi				
Daerah"	8 Laporan	218,914,800			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 dokumen	208,196,200		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase tercapainya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 unit, 80 paket, 4 dokumen, 14 Orang	1,048,451,820		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	"Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana				
Disiplin Pegawai"	1 Unit	126,438,000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut				
Kelengkapan"	80 Paket	81,540,500			
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	145,000,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	695,473,320		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	23 Paket, 15 Laporan	2,913,501,000		
Penyediaan Komponen Instalasi	"Jumlah Paket Komponen Instalasi				

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	4 Paket	108,501,000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	850,000,000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	750,000,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	600,000,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	200,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	325,000,000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	80,000,000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	22 Unit	420,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	100,000,000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	120,000,000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	8 Laporan, 55 Orang	4,375,866,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	58,200,000		

	Surat Menyurat				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	198,200,000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	50,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				
Umum Kantor yang Disediakan"	55 orang	4,069,466,000	260,000,000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	29 Unt			
"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan					
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan"	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	160,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100,000,000		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan		4,790,557,500		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi Bagi Hasil Pajak dengan Pemerintah Pusat yang diikuti/dilaksanakan	9 dokumen	407,788,000		

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9 dokumen	407,788,000		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			4,382,769,500		
	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	100.0%			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase sub kegiatan yang dilaksanakan/diikuti				
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 dokumen	300,000,000		
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 dokumen	388,808,000		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	209,906,000		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	200,000,000		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	300,000,000		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan	265,000,000		
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1010 NOP	750,000,900		

Bangunan (BPHTB)					
------------------	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan dan indikator kinerja dengan mengacu dan menyelaraskan Renstra SKPD Badan Pendapatan Daerah dan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) TA. 2025 ini disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2025

Atas perhatian dan dukungan semua pihak disampaikan terima kasih.

Ujoh Bilang 02 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



JOSMAN, S.IP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.19720610 200604 1 021